

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi di suatu daerah pada dasarnya merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, modal, teknologi, dan lain-lain. Oleh karena itu, peran manusia sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari proses pembangunan ekonomi tersebut. Manusia berfungsi sebagai tenaga kerja, *input* pembangunan, serta konsumen dari produk pembangunan. Berdasarkan teori pembangunan, sumber daya manusia yang berkualitas dapat meningkatkan peran manusia sebagai faktor produksi yang mampu menguasai teknologi, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas ekonomi. Untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang tinggi, diperlukan adanya modal manusia (*human capital*) (Sari et al., 2016).

Pertambahan penduduk yang disertai dengan peningkatan jumlah angkatan kerja yang terserap dapat mencerminkan perkembangan ekonomi yang positif, karena terjadi keseimbangan antara jumlah penduduk dan penyerapan tenaga kerja. Lapangan pekerjaan dipenuhi oleh mayoritas penduduk yang bekerja pada berbagai sektor ekonomi, atau dikenal sebagai penyerapan tenaga kerja. Ketika terjadi permintaan tenaga kerja, hal ini akan menyebabkan terserapnya penduduk dalam dunia kerja. Oleh karena itu, permintaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai bentuk penyerapan tenaga kerja. Namun, jika penawaran tenaga kerja meningkat melebihi permintaan, maka dapat menimbulkan masalah ketenagakerjaan (Widiastuti, 2014).

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah signifikan dalam pembangunan ekonomi di berbagai negara, terutama di negara berkembang. Indonesia merupakan sebagai salah satu negara berkembang dan juga menghadapi masalah serius dalam bidang ketenagakerjaan. Kenaikan jumlah angkatan kerja di Indonesia menjadi salah satu masalah utama yang mempengaruhi dinamika ketenagakerjaan di negara ini. Tingginya pertumbuhan angkatan kerja ini tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kesempatan kerja, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data dari (BPS, 2023), bahwa jumlah penduduk Provinsi Jambi pada rentang tahun 2018-2022 cenderung bertambah, pada tahun 2018 jumlah penduduk sebesar 3.515,03 ribu jiwa dan terus tumbuh sampai tahun 2019, tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah penduduk yakni sebesar 3.548,2 ribu jiwa, kemudian pada tahun 2021-2022 mengalami pertumbuhan di mana pada tahun 2022 jumlah penduduk mencapai 3.631,1 ribu jiwa. Angkatan kerja termasuk komponen dari jumlah penduduk. Seperti halnya jumlah penduduk, banyaknya angkatan kerja kerap menghadapi perkembangan. Bersumber pada data yang terdapat dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2018 jumlah angkatan kerja sebesar 1.790.437 jiwa, mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu 1.765.747 jiwa, lalu pada tahun 2020-2022 terus menerus peningkatan, yang mana pada tahun 2022 jumlah angkatan kerja sebesar 1.884.278 jiwa.

Meningkatnya jumlah angkatan kerja mencerminkan peningkatan penawaran tenaga kerja di pasar. Namun, peningkatan penawaran tenaga kerja ini tidak selalu diimbangi oleh permintaan tenaga kerja yang cukup untuk menyerap seluruh tenaga kerja yang tersedia. Kondisi ini berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran, menunjukkan bahwa tidak semua individu yang mencari pekerjaan dapat menemukan peluang yang sesuai (Wijayanto & Ode, 2019). Kondisi ini sesuai dengan (Pangastuti, 2015) yang mengutarakan jika penawaran tenaga kerja lebih tinggi daripada permintaan tenaga kerja, hal ini dapat menimbulkan masalah ketenagakerjaan, yaitu pengangguran. Kelebihan tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja menyebabkan banyak individu tidak memiliki pekerjaan, sehingga terjadi peningkatan tingkat pengangguran. Fenomena ini dapat berdampak negatif pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, mengingat jumlah pekerja yang tidak mendapatkan pekerjaan semakin banyak. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai agar penawaran dan permintaan tenaga kerja seimbang, guna menghindari tingginya angka pengangguran.

Untuk mengurangi masalah pengangguran yaitu dengan meningkatkan kesempatan kerja salah satunya menggunakan pembangunan di sektor pertanian. Menurut Todaro & Smith (2012), sektor pertanian terutama dalam perekonomian

pedesaan tidak hanya berperan pasif dan mendukung pembangunan ekonomi, namun harus berperan integral secara keseluruhan pada strategi pembangunan ekonomi, terutama terhadap negara-negara berkembang yang memiliki pendapatan rendah. Strategi pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan lapangan kerja membutuhkan tiga faktor dasar yaitu : (1) Mempercepat pertumbuhan produksi dengan perubahan insentif teknologi, kelembagaan, dan harga yang ditunjukan demi menambah produktivitas petani kecil; (2) Peningkatan permintaan produk pertanian dalam negeri merupakan hasil dari strategi pembangunan perkotaan yang bertujuan akan lapangan kerja; (3) Diversifikasi kegiatan pembangunan pedesaan, non-pertanian, dan padat karya kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung usaha tani masyarakat. Tanpa pembangunan pedesaan yang terpadu, pertumbuhan industri akan terhambat dan bahkan jika pembangunan tersebut berhasil, hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan internal yang serius dalam perekonomian.

Pembangunan pertanian di Indonesia terutama pada Provinsi Jambi merupakan bagian penting dari totalitas proses pembangunan nasional (Simanjuntak et al., 2018). Selama tahun 2018-2022 keunggulan sektor pertanian (A) menunjukkan penurunan, tetapi dalam waktu setahun terakhir, sektor ini mendapati kenaikan yang berarti bahwa sektor pertanian dapat mengatasi dampak dari COVID-19. Sektor industri (M) ialah sektor yang mendapati peningkatan cukup besar pada tahun terakhir. Sedangkan sektor jasa (S) ialah sektor yang terimbas karena pandemi COVID-19.

Tabel 1.1 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan

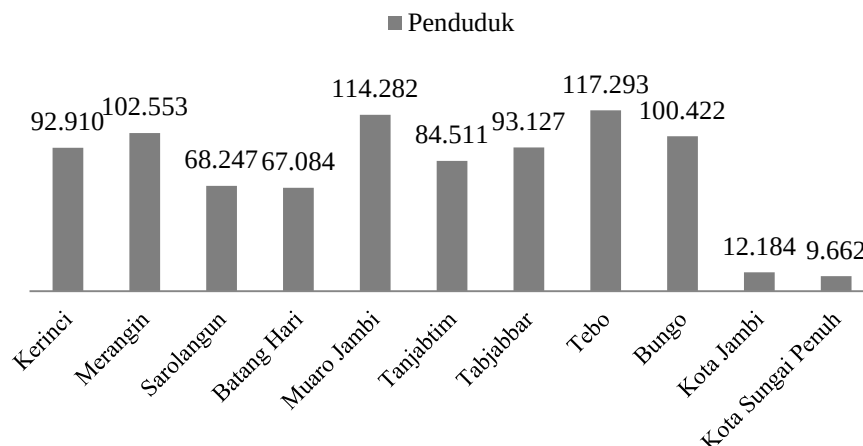
Utama					
Lapangan Pekerjaan Utama	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Pertanian (A)</i>	47,84	45,92	46,44	45,89	47,96
<i>Industri (M)</i>	13,25	13,87	14,20	13,68	13,46
<i>Jasa (S)</i>	38,91	40,20	39,37	40,43	38,58
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : (BPS, 2023)

Lapangan pekerjaan utama di sebagian besar Kabupaten di Provinsi Jambi didominasi oleh sektor pertanian, sementara sektor jasa menjadi unggulan dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Pada tahun 2022, terdapat tiga Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi yang penyerapan tenaga kerja di sektor pertaniannya berada di bawah 50%, yaitu Kabupaten Sarolangun, Kota Sungai Penuh, dan Kota Jambi. Dari data tersebut, yang artinya bahwa ketiga Kabupaten/Kota ini lebih didominasi oleh sektor industri dan jasa (BPS, 2023).

Sampai sekarang, masih banyaknya penduduk Provinsi Jambi bekerja sebagai pekerja informal pada sektor pertanian dan jasa, justru menjadi pengangguran semu (*false unemployment*) disebabkan oleh tenaga kerja tidak dibayar (*unpaid labor*), hal ini terjadi karena penduduk bekerja pada lapangan usaha pertanian dan jasa skala mikro-kecil yang dimiliki oleh keluarga atau kerabat (Pemprov Jambi, 2023).

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh (BPS, 2023) bahwa banyaknya tenaga kerja yang terserap pada sektor pertanian di Provinsi Jambi pada tahun 2018 sebesar 815.049 jiwa. Selanjutnya, pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 768.716 jiwa atau turun sebesar -5,68% disebabkan oleh menurunnya jumlah tenaga kerja secara keseluruhan sebanyak 24.69 ribu jiwa. Namun pada tahun 2020, jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian kembali meningkat yakni sebesar 807.654 jiwa atau naik sebesar 5,06%, hal ini disebabkan jumlah angkatan kerja secara keseluruhan bertambah sebanyak 78,2 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2021, jumlah angkatan kerja terus menurun dari tahun sebelumnya yakni sebesar 801.702 jiwa atau turun sebesar -0,73%, kondisi ini dikarenakan tidak adanya kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebab masih terbatasnya lowongan pekerjaan karena dalam keadaan pemulihan. Selanjutnya pada tahun 2022, meningkatnya kembali jumlah tenaga kerja sektor pertanian yakni sebesar 862.275 jiwa atau naik sebesar 7,55%.



Grafik 1.1 Jumlah Penduduk yang Bekerja Pada Sektor Pertanian Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2022

Sumber : (BPS, 2023)

Berdasarkan data pada Grafik 1.1, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2022 memiliki variasi yang cukup signifikan. Berikut adalah rincian jumlah tenaga kerja di sektor pertanian pada tahun 2022 untuk setiap kabupaten/kota:

Kabupaten Kerinci memiliki 92.910 tenaga kerja di sektor pertanian, sementara Kabupaten Merangin mencatatkan jumlah tenaga kerja sebanyak 102.553 jiwa. Kabupaten Sarolangun memiliki 68.247 tenaga kerja, sedangkan Kabupaten Batang Hari mencatatkan 67.084 jiwa. Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan angka yang cukup tinggi dengan 114.282 tenaga kerja, diikuti oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan 84.511 jiwa dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan 93.127 jiwa. Kabupaten Tebo mencatat jumlah tenaga kerja sektor pertanian tertinggi, yaitu 117.293 jiwa. Sementara itu, Kabupaten Bungo memiliki 100.422 tenaga kerja. Di sisi lain, Kota Jambi hanya memiliki 12.184 tenaga kerja sektor pertanian, dan Kota Sungai Penuh mencatat jumlah tenaga kerja terendah, yaitu 9.662 jiwa.

Dari data tersebut, dapat terlihat bahwa Kabupaten Tebo memiliki jumlah tenaga kerja di sektor pertanian tertinggi, yaitu sebanyak 117.293 jiwa. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh luasnya lahan pertanian yang dimiliki kabupaten ini serta dominasi sektor pertanian dalam struktur ekonomi daerah (BPS, 2022).

Sebaliknya, Kota Sungai Penuh memiliki jumlah tenaga kerja sektor pertanian terendah, yaitu 9.662 jiwa. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya lahan pertanian di daerah perkotaan serta dominasi sektor jasa dan perdagangan sebagai sumber utama mata pencaharian masyarakat. Berdasarkan pergerakannya kecenderungannya tenaga kerja pertanian mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tenaga kerja sektor industri, dengan hasil ini menunjukkan bahwa rendahnya produktifitas tenaga kerja di sektor pertanian dibandingkan tenaga kerja sektor industri menyebabkan pendapatan yang diperoleh pun semakin rendah sehingga kecendrungan tenaga kerja sektor pertanian akan menurun dan mencoba pindah ke sektor lainnya (Emilia et al., 2020).

Kabupaten Muaro Jambi juga menunjukkan angka yang tinggi dengan 114.282 tenaga kerja di sektor pertanian. Salah satu faktor yang berkontribusi adalah banyaknya wilayah yang masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber utama perekonomian. Muaro Jambi memiliki potensi besar pada sektor pertanian dengan lahan yang subur, mendukung produksi komoditas utama seperti kelapa sawit, karet, dan padi serta tanaman hortikultura (Sadikin et al., 2021). Maka, Kabupaten Muaro Jambi perlu penentuan sektor unggulan secara spesifik pada sektor pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Muaro Jambi maupun Provinsi Jambi sehingga menjadi leading sector, berdampak terhadap peningkatan sektor non basis menjadi sektor basis dan menjadi daerah spesialisasi sektor pertanian di Provinsi Jambi (Akbar & Yeniwati, 2023).

Sebagai perbandingan, Kota Jambi juga menunjukkan jumlah tenaga kerja yang rendah di sektor pertanian, yaitu hanya 12.184 jiwa. Hal ini sejalan dengan karakteristik kota yang lebih berkembang di sektor industri dan jasa dibandingkan dengan sektor pertanian. Sektor Jasa masih akan menjadi basis kesempatan kerja di kota Jambi (Parmadi et al., 2020), keadaan ini menegaskan bahwa kota Jambi mempunyai fungsi utama sebagai pusat perdagangan baik perdagangan besar maupun eceran guna mendukung distribusi barang dan jasa antar wilayah serta pusat jasa pelayanan pemerintahan, pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan di Provinsi Jambi (Wahyudi, 2017).

Dari Grafik 1.1, dapat dilihat bahwa kabupaten yang memiliki basis pertanian kuat dan luas lahan yang besar cenderung memiliki tenaga kerja sektor pertanian yang lebih banyak, sementara daerah perkotaan memiliki jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit karena bergantung pada sektor lain seperti perdagangan dan jasa.

Berdasarkan teori yang diutarakan Keynes dalam Mankiw (2010), rendahnya permintaan agregat memiliki konsekuensi akan rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran sehingga terjadi penurunan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mengurangi pengangguran, diperlukan peningkatan pengeluaran agregat melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah tersebut. PDRB yang dihasilkan dari berbagai sektor ekonomi dapat mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang terserap. Semakin besar produksi atau penjualan suatu perusahaan, semakin besar pula dorongan bagi perusahaan tersebut untuk meningkatkan permintaan tenaga kerja, sehingga mereka dapat memperbanyak produksi agar sejalan dengan peningkatan penjualan yang dicapai. Dengan kata lain, pertumbuhan PDRB yang didukung oleh aktivitas ekonomi yang beragam berpotensi memperluas kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran di wilayah tersebut (Feriyanto, 2014).

Laju pertumbuhan ekonomi memperlihatkan bagaimana kemampuan dari berbagai sektor ekonomi ketika menghasilkan nilai tambah atau pendapatan masyarakat pada satu kurun waktu. Agar dapat mengetahui naik-turunnya pertumbuhan ekonomi secara nyata dari tahun ke tahun maka dapat menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010. Pertumbuhan yang positif memperlihatkan terjadinya kenaikan kinerja perekonomian, begitu pula sebaliknya apabila negatif memperlihatkan terjadinya kemerosotan kinerja perekonomian dibandingkan rentang waktu sebelumnya (BPS, 2022).

Struktur PDRB Provinsi Jambi berdasarkan lapangan usaha atas dasar harga konstan masih diungguli sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, lalu diikuti oleh pertambangan dan penggalian, reparasi mobil dan sepeda motor, dan industri pengolahan (Pemprov Jambi, 2023). Dari sumber data (BPS, 2023), laju pertumbuhan PDRB ADHK sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun

2018 ialah sebesar 3,35%, lalu pada tahun 2019 mengalami penurunan yakni 2,94% yakni turun sebesar -0,41%, selanjutnya pada tahun 2020 terus menerus mengalami penurunan hal tersebut karena dampak yang disebabkan oleh kasus COVID-19 yaitu 1,51% yakni turun sebesar -1,43%, berikutnya pada tahun 2021 kembali meningkat dikarenakan adanya perbaikan perekonomian setelah terjadinya pandemi yakni 3,67% yakni naik sebesar 2,61% dan terus mengalami pertumbuhan pada tahun 2022 yakni sebesar 5% yakni naik sebesar 1,33%.

Luas lahan pertanian merupakan salah satu unsur yang dapat dikaitkan dengan penyerapan tenaga kerja pertanian. Luas lahan pertanian dapat mempengaruhi besarnya tenaga kerja pertanian yang diserap. Besar kecilnya suatu usaha ditentukan oleh luas lahan pertanian, semakin besar luas lahan yang digunakan maka semakin besar pula usaha tersebut (Andrias et al., 2017). Orang yang ingin memulai usaha pertanian memiliki lebih banyak pilihan pekerjaan jika lahan pertaniannya lebih luas. Namun, ketika lahan pertanian terbatas, pekerja akan pindah ke industri lain yang mereka yakini dapat menghasilkan pendapatan (Halim et al., 2015).

Berdasarkan data yang dirilis oleh (BPS, 2023) luas lahan pertanian di Provinsi Jambi pada tahun 2018 sebesar 86.203 hektar, lalu pada tahun 2019 menurun sebesar 65.536 hektar, selanjutnya pada tahun 2020 kembali bertambah sebesar 84.773 hektar, namun pada tahun 2021 kembali menurun sebesar 64.412 hektar, dan terus menurun sebesar 60.539 hektar pada tahun 2022.

Sumber daya manusia yang kompetitif dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk menambah nilai produksi, dengan modal sumber daya manusia yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas kerja sesuai standar yang dibutuhkan perusahaan. Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, maka dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia terlebih dahulu.

Berdasarkan data yang diterbitkan dari (Kemenkeu, 2023), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi mengalami peningkatan terus menerus dari tahun 2018-2022. Pada tahun 2018, IPM mencapai 70,65%, lalu kembali meningkat pada tahun 2019 yakni sebesar 71,26% atau naik sebesar 0,61%, selanjutnya pada tahun 2020, meningkat kembali menjadi 71,29% atau

naik sebesar 0,03%. Pada tahun 2021 juga meningkat yaitu 71,63% atau naik sebesar 0,34%. Berikutnya, pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan yaitu 72,14% atau naik sebesar 0,51%. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas hidup dan pembangunan manusia di Provinsi Jambi terus mengalami perbaikan. Dua kota di Provinsi Jambi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi adalah Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh, diikuti oleh Kabupaten Kerinci yang berada di peringkat ketiga. Kabupaten yang memerlukan perhatian lebih adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang memiliki IPM terendah sejak tahun 2010. Meskipun IPM di kabupaten ini meningkat setiap tahun, nilainya masih cukup jauh dibandingkan dengan kabupaten lainnya (Kemenkeu, 2022).

Berdasarkan pemaparan latar belakang, telah banyak pembahasan mengenai penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, namun terdapat perbedaan hasil yang dijelaskan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh (Simanjuntak et al., 2018) Penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian dengan penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut. Artinya, peningkatan PDRB di sektor pertanian berkorelasi dengan peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor tersebut. Namun, variabel lain seperti nilai tukar petani dan investasi di sektor pertanian tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor ini. Dengan kata lain, meskipun nilai tukar petani dan investasi merupakan faktor penting dalam sektor pertanian, mereka tidak secara langsung mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang terserap. Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian (Sakdiyah & Taufiq, 2023) yang menjelaskan terdapat hubungan negatif PDRB sektor pertanian dan upah riil buruh tani terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, sedangkan variabel luas lahan, dan nilai tukar petani tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Karena terdapat perbedaan hasil dari beberapa penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti penelitian dengan judul **“Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan PDRB sektor pertanian, luas lahan pertanian, IPM dan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian serta kontribusinya terhadap PDRB total Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode tahun 2018-2022?
2. Bagaimana pengaruh PDRB sektor pertanian, luas lahan pertanian, dan IPM terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perkembangan dari PDRB sektor pertanian, luas lahan pertanian, IPM, dan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian serta kontribusinya terhadap PDRB total Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode tahun 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari PDRB sektor pertanian, luas lahan pertanian, dan IPM terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi periode tahun 2018-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademisi, hasil penelitian ini semoga dapat berguna bagi mahasiswa atau dosen untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan mengembangkan penelitian mengenai penyerapan tenaga kerja sektor pertanian.
2. Secara praktisi, hasil dari penelitian ini semoga dapat memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan yaitu bagi peneliti, peneliti selanjutnya, pembaca serta pemerintah terkhusus yaitu pemerintahan Provinsi Jambi agar dapat dijadikan perbandingan atau pedoman untuk perbaikan agar dapat lebih baik lagi pada tahun yang akan datang.